

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**



Disusun Oleh :

AMALIA WIDI UTAMI

21312102

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN JUDUL

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Strata -1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Amalia Widi Utami

21312102

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun. Sepengetahuan saya, seluruh kutipan atau pendapat milik orang lain yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan secara tertulis dan tercantum dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Penulis,


Amalia Widi Utami

HALAMAN PENGESAHAN
DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

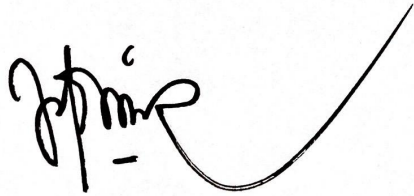
Amalia Widi Utami

21312102

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 Juni 2025

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Johan Arifin', with a long, sweeping underline that extends to the right.

(Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. C.FrA, CertIPSAS)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Disusun oleh : AMALIA WIDI UTAMI

Nomor Mahasiswa : 21312102

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 02 Juli 2025**

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

**Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

MOTTO

*“Allah SWT tidak akan membebani seseorang hamba melainkan sesuai
dengan kesanggupannya”*

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan kemudahan dan kelancaran.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan serta menjadi rahmatan lil 'alamin bagi seluruh umat manusia.
3. Kepada orang tua penulis yaitu Bapak Zubaidi dan Ibu Tutik, yang telah memberikan segala dukungan dan doa terbaik untuk penulis, tanpa doa dan restu penulis tidak akan sampai dititik ini.
4. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. C.FrA, CertIPAS. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis.

5. Kakak penulis Dani Untari, Mika, adik penulis Arjun Naja dan keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa yang tulus, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Latifa, Dona, Ghazy selaku teman dari penulis sejak semester awal perkuliahan di Universitas Islam Indonesia, dukungan, motivasi serta doa yang mereka berikan kepada penulis, sehingga penulis memiliki semangat Kembali untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
7. Nada, Tiara, Pipit selaku teman penulis sejak smp, yang selalu memberikan afirmasi positif kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan penulis di Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan motivasi dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.

Penulis berharap karya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu penulis sangat menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta,

Penulis, 8 Mei 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
MOTTO	IV
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
ABSTRAK	XI
ABSTRACT	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN	8
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 LANDASAN TEORI	10
2.1.1 TEORI INSTITUSIONAL	10
2.1.2 KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	15
2.1.3 JUMLAH PENDUDUK	16
2.1.4 PERTUMBUHAN EKONOMI	18
2.1.5 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).....	19
2.1.6 INDEKS <i>E-GOVERNMENT</i>	20
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	21
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN	23
2.3.1 PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	23

2.3.2	PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	25
2.3.3	PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	27
2.3.4	PENGARUH INDEKS <i>E-GOVERNMENT</i> TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	28
2.4	KERANGKA PENELITIAN.....	31
BAB III METODE PENELITIAN		34
3.1	METODOLOGI PENELITIAN.....	34
3.2	POPULASI DAN SAMPEL	34
3.3	VARIABEL PENELITIAN.....	36
3.3.1	VARIABEL INDEPENDEN (X)	37
3.3.2	VARIABEL DEPENDEN (Y)	39
3.4	METODE ANALISIS DATA	40
3.4.1	STATISTIK DESKRIPTIF	41
3.4.2	METODE ANALISIS REGRESI LOGISTIK	41
3.4.3	UJI HIPOTESIS	44
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF	46
4.2	METODE ANALISIS REGRESI LOGISTIK.....	49
4.2.1	MENGUJI KESELURUHAN MODEL (<i>OVERALL MODEL FIT</i>)	49
4.2.2	MENGUJI KELAYAKAN MODEL REGRESI (<i>GOODNESS FIT TEST</i>)	50
4.2.3	KOEFISIEN DETERMINASI	50
4.2.4	ANALISIS REGRESI LOGISTIK.....	51
4.3	PENGUJIAN HIPOTESIS.....	53
4.3.1	UJI PARSIAL T	53
4.4	PEMBAHASAN UJI HIPOTESIS	56
4.4.1	PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	56
4.4.2	PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	57
4.4.3	PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	59
4.4.4	PENGARUH INDEKS <i>E-GOVERNMNET</i> TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	60
BAB V PENUTUP.....		62
5.1	KESIMPULAN.....	62
5.2	KETERBATASAN PENELITIAN	63

5.3 SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh beberapa faktor terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten/kota di Indonesia pada tahun anggaran 2021-2023. Variabel yang diteliti meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, indeks *e-government*. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengambilan sampel sebanyak 99 pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021-2023 melalui metode purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi logistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, indeks *e-government* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, indeks *e-government*, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to empirically test the influence of several factors on the quality of local government financial reports (LKPD) of regencies/cities in Indonesia in the 2021-2023 budget year. The variables studied include population, economic growth, human development index, e-government index. The approach used is quantitative, with a sample of 99 local governments in the 2021-2023 budget year through a purposive sampling method. Data analysis was carried out using logistic regression with the help of SPSS software. The results of the study indicate that population, human development index, e-government index have a positive influence on the quality of LKPD. Meanwhile, economic growth does not show any influence on the quality of local government financial reports.

Keywords: *Population, economic growth, human development index, e-government index, quality of local government financial reports.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin berkembang, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola yang baik adalah pendekatan berorientasi konsep untuk pengembangan sektor publik. Selain itu, fungsi sebagai peraturan negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang diarahkan pada pengembangan masyarakat untuk mencapai pemerintah yang efektif, transparan, dan berwibawa (Mardiasmo, 2021). Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat serta bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui reformasi regulasi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Kualitas laporan keuangan yang baik sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan maka, harus didukung oleh kualitas aparatur

pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan andal dan akurat (Defitri, 2018).

Pemerintah Daerah akan berupaya untuk memberikan kinerja yang baik, tetapi tidak hanya itu terdapat maksud lain yaitu untuk memperoleh legitimasi dan kekuasaan politik yang layak di daerahnya. Hal tersebut selaras dengan teori isomorfisma institusional, yang menyatakan bahwa organisasi bersaing tidak hanya untuk sumber daya dan pelanggan, tetapi untuk kekuasaan legitimasi dan politik, serta kesesuaian sosial dan ekonomi (Sofyani & Akbar, 2015).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan keuangan menjadi alat penting untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya yang ada demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik serta kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara terstruktur. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Hidayat et al., 2021). Namun, tidak semua daerah mampu menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi standar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan daerah, masih terdapat banyak permasalahan terkait akuntabilitas dan transparansi. Masalah-masalah tersebut

sering kali berkaitan dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Salah satu faktor eksternal utama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk mencerminkan kebutuhan layanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Daerah dengan populasi besar sering menghadapi tantangan lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Misalnya, peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan tekanan terhadap anggaran daerah, yang pada gilirannya memengaruhi bagaimana pemerintah merencanakan, mengalokasikan, dan melaporkan penggunaan anggaran tersebut. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar juga cenderung menghadapi kerumitan administrasi yang lebih tinggi, sehingga risiko kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan menjadi lebih besar (Azahari & Sulardi, 2021).

Jumlah penduduk suatu daerah merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu wilayah, semakin kompleks juga kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya beban anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar permintaan masyarakat terhadap pengungkapan laporan keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Jumlah penduduk memberikan efek positif terhadap tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Hendriyani & Tahar, 2015).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kapasitas suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan, baik melalui pajak, retribusi, maupun sumber pendapatan lainnya. Daerah dengan ekonomi yang tumbuh secara konsisten memiliki peluang lebih besar untuk mengelola keuangan secara efisien dan efektif. Di sisi lain, daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah sering kali bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang dapat memperumit proses pelaporan keuangan dan mengurangi fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran (Sari et al., 2019).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator gabungan yang mencerminkan tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat suatu daerah. IPM yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada akhirnya memengaruhi kompetensi aparatur pemerintah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan. Daerah dengan IPM tinggi cenderung memiliki staf yang lebih terlatih dalam menggunakan sistem akuntansi pemerintah, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan suatu pembangunan tidak semestinya hanya dinilai dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Pergeseran paradigma ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan pendekatan pembangunan yang sebelumnya hanya fokus pada aspek ekonomi semata. Sebelum dekade 1970-an, kemajuan pembangunan biasanya diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Nasional Bruto (GNP). Namun dalam kenyataannya, banyak negara yang mencatat

pertumbuhan GNP tinggi tetapi masih memiliki tingkat kualitas hidup manusia yang rendah (Hendri & Yafiza, 2020).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah indeks *e-government*, yang mengukur sejauh mana teknologi informasi dimanfaatkan dalam tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pelaporan keuangan menjadi lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan manual, dan meningkatkan transparansi. Daerah dengan indeks *e-government* yang tinggi umumnya memiliki sistem pelaporan berbasis teknologi yang memungkinkan pelacakan, pengelolaan, dan audit data secara real-time. Hal ini mendukung terwujudnya laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Secara khusus, penerapan *e-government* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membuka ruang interaksi antara warga dan pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses kebijakan publik melalui komunikasi dengan para pengambil keputusan sepanjang siklus kebijakan. Keterlibatan ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Selain itu, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas yang didorong oleh *e-government* turut mendukung upaya pemberantasan korupsi, memperluas akses informasi publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, menekan angka kejahatan, serta meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat (Susilawati et al., 2023).

Kualitas laporan keuangan juga menjadi perhatian dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas publik. Laporan yang berkualitas memungkinkan

masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menggunakan anggaran secara bijak dan efektif. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya menjadi alat administratif tetapi juga instrumen utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas suatu entitas. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan tanggung jawab penyusunnya atas informasi yang disajikan. Umumnya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan atribut penting dari sistem akuntansi, di mana terdapat hubungan timbal balik antara akuntabilitas dan transparansi. Makin baik mutu laporan keuangan yang dihasilkan, maka makin tinggi pula tingkat akuntabilitas dan transparansi yang dapat dicapai, demikian pula sebaliknya (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

Namun, perbedaan karakteristik antar daerah, seperti populasi, tingkat pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan adopsi teknologi, menyebabkan variasi dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan indeks *e-government* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan tata kelola keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis variabel dependen berupa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Penulis juga memperhitungkan berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut. Variabel independen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM) yang digunakan sebagai penguji teori isomorfisma *normative*. Variabel pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penguji teori isomorfisma mimetik. Variabel *e-government* yang digunakan sebagai penguji pada teori isomorfisma koersif.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan judul yang sesuai dengan penelitian ini adalah **“Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah Indeks *E-Government* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Menganalisis pengaruh IPM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menganalisis indeks *e-government* terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut:

1.4.1 Bagi Peneliti

Memperkaya pemahaman peneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia, ekonomi, dan teknologi.

1.4.3 Bagi Akademisi

Menyediakan referensi tambahan bagi penelitian lebih lanjut di bidang tata kelola keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas dasar-dasar teori yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, penyusunan kerangka berpikir, serta perumusan hipotesis penelitian yang menjadi dasar analisis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, penentuan populasi dan sampel, definisi variabel penelitian, serta teknik analisis data yang diterapkan dalam studi ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta interpretasi terhadap hasil penelitian yang dibandingkan dengan studi sebelumnya untuk mendukung pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini memuat ringkasan temuan utama dari penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran yang berguna bagi penelitian mendatang maupun pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Institusional

Menurut Scoot (1995), teori institusional menjelaskan tentang bagaimana struktur, kebijakan, dan praktik organisasi dipengaruhi oleh norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam lingkungan eksternal mereka, Teori ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh efisiensi teknis, tetapi juga oleh sejauh mana mereka mematuhi ekspektasi sosial yang ada dalam lingkungannya (Romy et al., 2022). Berdasarkan teori ini, sebuah organisasi beroperasi dalam kerangka institusi yang mencakup tekanan regulasi (aturan dan hukum), *normative* (nilai-nilai dan standar profesi), dan kognitif (kepercayaan dan asumsi Bersama. Dilihat dari ketiga elemen tersebut maka akan menciptakan tekanan yang memengaruhi keputusan organisasi, termasuk dalam tata kelola dan pelaporan keuangan. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan lebih cenderung bisa menyesuaikan diri terhadap harapan eksternal atau harapan sosial di mana organisasi itu berada.

Teori institusional dalam konteks pemerintah daerah yaitu menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan praktik pelaporan keuangan mereka agar sesuai dengan standar dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ada di Indonesia. Dalam pemenuhan ekspektasi ini sangat penting untuk memperoleh legitimasi dari

beberapa pihak yaitu pemangku kepentingan, seperti masyarakat, Lembaga pengawas, dan pemerintah pusat. Teori institusional menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu organisasi tidak lepas dari adanya tekanan normatif, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Inti dari konsep institusionalisasi adalah bahwa banyak aktivitas organisasi terbentuk melalui pola-pola yang terbangun secara historis dan menjadi legitimasi dalam lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Oleh sebab itu, praktik-praktik dalam organisasi dapat diprediksi berdasarkan perilaku yang dianggap sah, yang biasanya berakar pada nilai-nilai budaya, tradisi dalam sektor industri, sejarah institusi, hingga tren manajerial yang berkembang). Dalam konteks pelaksanaan sistem pengukuran kinerja di pemerintah daerah, hal ini mencerminkan bahwa akan muncul berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja, yang muncul seiring dengan diterapkannya sistem pengukuran tersebut (Sofyani & Akbar, 2013).

Dalam teori institusional terdapat tiga pilar yaitu sebagai berikut:

1. *Pillar Regulative* (Regulasi)

Dalam pilar ini mencerminkan pengaruh aturan, hukum, dan kebijakan yang mengikat sebuah organisasi. Jika dilihat dari konteks pelaporan keuangan pemerintah daerah, regulasi seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintah memaksa pemerintah daerah untuk mematuhi standar pelaporan yang telah ditetapkan.

2. *Pillar Normative* (Normatif)

Dalam pilar ini mencakup beberapa hal yaitu pengaruh nilai, norma, dan standar profesi yang akan mendorong sebuah organisasi untuk melakukan Tindakan sesuai dengan praktik yang dianggap benar. Dalam pengelolaan keuangan daerah misalnya, keberadaan standar profesional seperti pelatihan aparatur pemerintah dalam bidang akuntansi menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas laporan keuangan.

3. *Pillar Cognitive* (Kognitif)

Dalam pilar ini akan merujuk pada kepercayaan dan asumsi yang diterima secara luas dalam suatu masyarakat atau komunitas. Berdasarkan praktik pelaporan keuangan pemerintah daerah, kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar yang mengarahkan kebijakan pelaporan.

Isomorphism Institutional

Menurut DiMaggio dan Powell (1983) teori isomorphism adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Teori isomorphism ini merupakan cabang dari teori institusional yang didalamnya menjelaskan tentang bagaimana organisasi cenderung menjadi serupa dalam struktur dan praktik mereka sebagai hasil dari tekanan yang ada dalam lingkungan institusional. Terdapat dua jenis Isomorfisme, yaitu: (1) Isomorfisme Kompetitif (*Competitive Isomorphism*) yaitu asumsi rasionalitas system yang menekankan persaingan pasar, perubahan yang bagus, dan pengukuran kesesuaian; dan (2) Isomorfisme Institusional (*Institutional Isomorphism*) yaitu organisasi bersaing tidak hanya untuk sumber daya dan pelanggan, tetapi untuk kekuasaan legitimasi politik dan institusional, untuk

kesesuaian sosial serta ekonomi. Memahami politik dan tata cara kehidupan organisasi yang lebih modern merupakan guna dari konsep Isomorfisme Institusional (Sofyan & Akbar, 2015).

Isomorphism menurut DiMaggio dan Powell (1983) memiliki tiga mekanisme utama yaitu, *coercive isomorphism*, *mimetic isomorphism*, dan *normative isomorphism*.

1. *Coersive Isomorphism* (Isomorfisme Koersif)

Isomorfisme koersif ini muncul karena tekanan eksternal seperti regulasi, kebijakan pemerintah, atau harapan dari otoritas yang lebih tinggi. Tekanan koersif dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat berasal dari beberapa hal yaitu (1) Regulasi nasional seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengharuskan laporan keuangan memenuhi standar tertentu, (3) Dan tuntutan masyarakat agar terdapat transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah. Dalam kasus nyata, pemerintah daerah wajib mematuhi aturan mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual.

2. *Mimetic Isomorphism* (Isomorfisme Mimetik)

Isomorfisme mimetic ini muncul ketika sebuah organisasi meniru praktik dari organisasi lainnya yang dianggap lebih sukses atau *legitimate*. Dalam konteks pemerintah daerah, praktik ini sering ditemui ketika suatu daerah meniru inovasi yang berhasil di daerah lain, salah satunya dalam system *e-government* atau pengelolaan keuangan berbasis teknologi.

3. *Normative Isomorphism* (Isomorfisme Normatif)

Isomorfisme normative ini muncul akibat dari tekanan dari profesionalisme dan standar profesi tertentu. Aparatur yang memiliki Pendidikan formal atau pelatihan professional di bidang akuntansi publik maka akan cenderung menerapkan standar dan praktik yang sesuai dengan pelatihan mereka.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori institusional dan isomorphism memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana pemerintah daerah dipengaruhi oleh tekanan regulasi, kebutuhan akan legitimasi sosial, serta norma dan standar profesi dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah akan menunjukkan bahwa mereka mampu dan kompeten dalam menjalankan serta mengelola pemerintah. Dalam isomorphism koersif, pemerintah daerah terpaksa mematuhi regulasi dan standar yang telah ditetapkan, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memperkuat tekanan ini, karena pemerintah daerah harus menunjukkan tata kelola yang lebih baik guna mempertahankan legitimasi di mata masyarakat dan pemerintah pusat.

Selain itu, isomorphism mimetik dan normatif juga relevan. Indeks *e-government* mencerminkan adopsi teknologi informasi, di beberapa hal diimplementasikan dengan meniru praktik terbaik dari daerah lain yang lebih maju (*mimetic isomorphism*). Namun di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) menggambarkan kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terbentuk dari pendidikan formal atau pelatihan profesional. Hal ini berkaitan dengan

isomorphism normatif, di mana profesionalisme dan standar keahlian menjadi pendorong dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga teori isomorphism akan memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana faktor-faktor eksternal seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan *e-government* memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan. Ketentuan ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bertujuan akhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kenyataannya masih ditemukan sejumlah tantangan dalam pengelolaan keuangan negara, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* belum sepenuhnya optimal (Widiawaty, 2016). Laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). SAP ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keandalan.

Menurut UU terdapat beberapa prinsip laporan keuangan pemerintah yaitu (1) Transparansi: laporan harus dapat diakses oleh public dan memberikan informasi yang jujur serta dapat dipercaya, (2) Akuntabilitas: laporan keuangan harus mencerminkan tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan keuangan, (3) Keandalan: informasi yang disajikan harus valid dan bebas dari kesalahan material, (4) Relevans: laporan harus memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi berbagai aspek tata kelola pemerintahan, termasuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, jumlah penduduk berkaitan dengan tingkat kebutuhan pelayanan publik, alokasi anggaran, dan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Badan Pusat Statistika, 2023 jumlah penduduk mengacu pada total individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Faktor ini mencerminkan potensi sumber daya manusia sekaligus beban administratif bagi pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, termasuk dalam hal penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan pengelolaan keuangan. Jumlah penduduk memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap tingkat keterbukaan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah penduduk, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi keuangan. Hasil tersebut konsisten

dengan penelitian Liestiani (2008), yang menemukan pengaruh positif jumlah penduduk terhadap keterbukaan laporan keuangan. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Ingram (1984) serta Robbins dan Austin (1986), yang meskipun menemukan pengaruh positif, namun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Jumlah penduduk digunakan sebagai indikator kompleksitas pemerintahan. Wilayah dengan populasi besar, yang umumnya merupakan daerah perkotaan, cenderung memiliki sistem pemerintahan yang lebih kompleks. Menariknya, kompleksitas ini justru tidak menurunkan, melainkan meningkatkan tingkat pengungkapan. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya tekanan dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akses informasi yang lebih luas dalam laporan keuangan pemerintah (Hilmi & Martani, 2012).

Jumlah penduduk yang besar dapat memengaruhi pengelolaan keuangan daerah melalui dua mekanisme utama:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah

Jumlah penduduk yang besar berpotensi meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, terutama dari sektor ekonomi dan konsumsi masyarakat (Mahmudi, 2020). Namun, hal ini bergantung pada tingkat pendapatan dan aktivitas ekonomi penduduk.

2. Peningkatan Beban Anggaran

Semakin banyak penduduk, semakin tinggi pula kebutuhan terhadap pelayanan public seperti Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dapat meningkatkan beban belanja pemerintah daerah, yang berpotensi memengaruhi kualitas penyusunan dari pelaporan keuangan pemerintah.

Jumlah Penduduk dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, jumlah penduduk menentukan skala dan cakupan anggaran pemerintah daerah. Secara tidak langsung, jumlah penduduk memengaruhi kompleksitas pengelolaan keuangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah).

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks pemerintahan daerah, pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah dan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan komitmen terhadap tata kelola yang baik. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah memiliki sumber daya yang lebih baik untuk mengembangkan sistem pelaporan, meningkatkan kompetensi SDM, serta memperkuat pengawasan internal. Hal ini mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dan tepat waktu. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, peran akuntansi menjadi semakin krusial sebagai sarana

untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas keuangan yang terjadi. Oleh karena itu, setiap entitas, pemerintahan, termasuk perusahaan, dituntut untuk menyusun laporan keuangan guna menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) perusahaan. Menanggapi kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan pedoman penyusunan laporan keuangan, yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Keberadaan standar ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan proses penyusunan laporan keuangan agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Ishak & Syam, 2020).

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut BPS (2020a), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan sejauh mana masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dalam berbagai aspek seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan secara rutin dipublikasikan dalam Human Development Report (HDR) setiap tahunnya. IPM tersusun atas tiga dimensi utama, yakni: (1) umur panjang serta kehidupan yang sehat, (2) tingkat pengetahuan, dan (3) standar hidup yang layak. IPM menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia, serta berperan dalam menentukan peringkat atau tingkat kemajuan suatu daerah atau negara (Harahap & Zenabia, 2024). Dengan IPM yang bagus, maka harus diimbangi dengan laporan keuangan yang lebih transparan dan jelas di

pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi umumnya memiliki kinerja yang lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik serta dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam hal akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Hal ini selaras dengan pendapat UNDP (1990) yang menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan elemen dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif (good governance). Daerah yang memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas cenderung memiliki aparatur yang lebih cakap dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai melalui berbagai indikator, seperti ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian dengan standar akuntansi, serta opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012) mengungkapkan bahwa peningkatan mutu SDM yang juga menjadi bagian dari peningkatan IPM berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, IPM dapat dianggap sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.1.6 Indeks *E-Government*

E-government merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kerja, memperluas distribusi informasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik (UNDP, 2014). Penerapan *e-government* oleh pemerintah daerah dilakukan melalui pemanfaatan internet dan teknologi digital lainnya untuk

menyampaikan informasi, layanan, dan berbagai bentuk interaksi kepada masyarakat, sektor swasta, serta instansi pemerintahan lainnya (Elbahnasawy, 2014). Dengan adanya sistem ini, diharapkan kesenjangan informasi atau information asymmetry antara pemerintah dan masyarakat dapat diminimalkan (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil dari penelitian terdahulu dengan topik serupa yang dijadikan referensi pada penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Naopal, Rahayu, Priyandani, Yudowati, (2017)	Dependen: Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Independen: - Karakteristik Daerah - Jumlah Penduduk - Temuan Audit - Opini Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Opini Audit mempunyai pengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2	Heryanti (2019)	Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: - Pendapat Asli Daerah - Dana Perimbangan - Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3	Aggatha, Rahayu, Inawati, (2023).	Dependen: Pengungkapan informasi keuangan Independen: - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Opini Audit - Kompleksitas Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah, dan tidak berpengaruh atas variabel dependen pengungkapan informasi keuangan. Sedangkan kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan.

		- Kekayaan Daerah	
4	Syamsul, Zuhroh (2021)	Dependen: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Independen: Implementasi <i>E-Government</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi E-Governance berdampak positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
5	Purnomo, Handayani (2019)	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Independen: - Kompetensi Sumber Daya Manusia - <i>Good Governance</i> - <i>E-Government</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Good Government, dan <i>E-Government</i> berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan.
6	Nurhayati, Hamzah (2020)	Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: - Pertumbuhan Ekonomi - Ukuran Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7	Alfi1, Sari (2023)	Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: - <i>Leverage</i> - Jumlah Penduduk - Umur Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage dan umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
8	Puspa, Rahayu (2019)	Dependen: Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Independen: - Kekayaan Daerah - Umur Administratif - Indeks Pertumbuhan Manusia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah, sedangkan umur administratif dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.
9	Krisna Raharja, Suharno, Harimurti (2017)	Dependen: Kinerja Keuangan Daerah Independen: - Pertumbuhan Ekonomi - Pengangguran - Kemiskinan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
10	Najah (2016)	Dependen: Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Independen: - Aset Pemerintah Daerah - Kekayaan Daerah - Debt - <i>Intergovernmental revenue</i> - Indeks Pembangunan Manusia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan, sementara asset pemerintah, debt, dan intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masyarakat atau penduduk merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi pemerintah daerah. Jumlah penduduk yang tinggi mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan publik. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, tekanan terhadap pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi secara lebih terbuka juga meningkat, sejalan dengan peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk, semakin kuat pula dorongan masyarakat untuk menuntut transparansi yang lebih tinggi dalam laporan keuangan pemerintah. Selain itu, semakin kompleks struktur pemerintahan, maka semakin luas pula informasi yang perlu diungkapkan (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018).

Jumlah penduduk dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompleksitas suatu wilayah. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin kompleks pula tata kelola pemerintahan daerah tersebut, yang pada akhirnya mendorong meningkatnya kebutuhan untuk melakukan pengungkapan informasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28, yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan terhadap pelayanan publik di setiap daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah penduduk, semakin besar pula dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan informasi, sesuai dengan perannya sebagai pelayan masyarakat (Hendriyani & Tahar, 2015).

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk memainkan peran aktif dalam mendorong transparansi serta pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin kompleks pula kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan dalam penyajian informasi keuangan.

Jumlah penduduk termasuk dalam *coercive isomorphism* karena besarnya populasi suatu daerah dapat menimbulkan tekanan institusional yang kuat terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam teori institusional yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983), tekanan dapat berasal dari aktor eksternal seperti pemerintah pusat, regulasi formal, atau ekspektasi sosial masyarakat. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik (tekanan koersif). Pemerintah daerah akan menghadapi tekanan sosial dan politik untuk memenuhi standar pelaporan yang lebih tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dengan demikian, jumlah penduduk berperan sebagai sumber tekanan koersif yang memaksa organisasi publik untuk menyesuaikan diri dengan praktik pelaporan keuangan yang lebih profesional dan akuntabel demi mempertahankan legitimasi di mata publik dan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang terlihat dari naiknya produksi barang dan jasa serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur kinerja ekonomi dari waktu ke waktu, serta menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkesinambungan. Ketika pertumbuhan ekonomi berjalan positif, hal tersebut dapat menarik minat investor, yang selanjutnya mendorong pembangunan infrastruktur daerah. Infrastruktur yang memadai, disertai peningkatan investasi, berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, akuntansi memainkan peran strategis dalam menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai aktivitas keuangan. Informasi tersebut sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan internal seperti manajemen, maupun eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Oleh karena itu, perusahaan ataupun pemerintah dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan, guna memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, akuntansi menjadi instrumen utama dalam menjembatani aktivitas ekonomi dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel (Ishak & Syam, 2020).

Pertumbuhan ekonomi termasuk dalam *coercive isomorphism* karena kondisi ekonomi yang berkembang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Tekanan ini dapat berasal dari pemerintah pusat, lembaga pengawas, maupun masyarakat yang semakin menuntut laporan keuangan yang kredibel dan sesuai standar. Dalam konteks teori *coercive isomorphism*, seperti dijelaskan oleh DiMaggio dan Powell (1983), tekanan ini bersifat formal maupun informal, misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kewajiban pelaporan, dan dorongan dari aktor eksternal yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Pertumbuhan ekonomi sering kali menyebabkan peningkatan arus dana dan kompleksitas transaksi keuangan, sehingga pemerintah daerah dipaksa untuk menyesuaikan praktik pelaporan mereka agar sesuai dengan ekspektasi tersebut. Dengan kata lain, dalam situasi pertumbuhan ekonomi, pemerintah tidak hanya terdorong secara internal, tetapi juga terpaksa secara institusional untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai bentuk legitimasi dan kepatuhan terhadap tuntutan eksternal.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Putra (2018), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, serta standar hidup yang layak. IPM sering dijadikan indikator keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, keberadaan masyarakat yang berkembang secara optimal menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pemerintahan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu tolak ukur akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang berkualitas ditandai dengan penyajian yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk dalam kategori normatif isomorphism karena IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia, terutama dari aspek pendidikan dan profesionalisme, yang mendorong adopsi norma dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketika IPM suatu daerah tinggi, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih kuat terhadap standar akuntansi serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menciptakan tekanan normatif, yaitu dorongan untuk mengikuti norma-norma profesional yang diterima secara luas, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaruh IPM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui mekanisme

isomorphism normatif. Pemerintah daerah dengan IPM yang lebih tinggi lebih mungkin untuk mengadopsi praktik pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi sebagai bentuk konformitas terhadap norma profesional yang berlaku dalam lingkungan institusional mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2016) dan Wiguna (2016) menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Utami, 2019). Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.4 Pengaruh Indeks *E-Government* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan *e-government* di Indonesia sejalan dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, dengan pengaturannya ditetapkan melalui undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 23G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi. Hal ini menegaskan peran dan posisi strategis BPK dalam mendukung terwujudnya transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan

baik di Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk menjaga transparansi melalui proses, sistem, dan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, inti dari transparansi adalah integritas atau kebenaran informasi dalam laporan keuangan negara (Sari & Winarno, 2012).

Penyampaian informasi keuangan oleh pemerintah daerah saat ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74 Tahun 2016. PP No. 71 Tahun 2010 membahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus menggunakan basis akrual. Ketentuan ini diperkuat dengan PMK No. 74 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 12, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola data keuangan dan menyampaikannya kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Penjabaran dari kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan transparansi melalui penyampaian informasi keuangan. Tindakan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Menurut Ulum dan Sofyanu (2016:35), pelaksanaan *good governance* dapat tercapai apabila tiga prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas, telah terpenuhi (Putra et al., 2018).

Penerapan *e-government* merupakan langkah strategis pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi berbasis web untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan mempermudah proses komunikasi serta transformasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti komputer dan jaringan, membawa berbagai keuntungan, antara lain dalam hal akurasi operasional dan kemampuan menjalankan berbagai fungsi secara simultan (*multiprocessing*), yang menjadikannya sebagai alat multifungsi yang andal. Komputer, sebagai salah satu komponen utama teknologi informasi, memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan.

Indeks *e-government* termasuk dalam *mimetic isomorphism* karena penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan sering kali dilakukan sebagai respons terhadap ketidakpastian dan dorongan untuk meniru praktik terbaik dari daerah atau negara lain yang dianggap lebih sukses. Menurut DiMaggio dan Powell (1983), *mimetic isomorphism* terjadi ketika organisasi menghadapi situasi ketidakpastian dan memilih untuk meniru strategi organisasi lain yang dianggap lebih efektif atau *legitimate*. Dalam konteks ini, daerah-daerah dengan indeks *e-government* yang tinggi biasanya menjadi rujukan atau model bagi daerah lain yang ingin meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas. Pemerintah daerah yang merasa tertinggal secara teknologi atau belum optimal dalam pelaporan keuangan digital, cenderung meniru kebijakan, sistem, atau inovasi digital dari daerah lain sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan zaman. Dengan demikian, peningkatan indeks *e-government* sering mencerminkan proses imitasi institusional yang didorong oleh keinginan untuk memperoleh legitimasi, efisiensi, dan reputasi yang baik dalam tata kelola pemerintahan modern.

Dengan demikian, diperlukan sistem teknologi informasi yang lebih efisien dan efektif. Penyusunan laporan keuangan daerah yang masih dilakukan secara manual dinilai tidak lagi sesuai, karena dianggap tidak efisien, kurang andal, serta rawan terhadap kesalahan. Kondisi ini berisiko menurunkan akurasi laporan keuangan yang disajikan. Pemahaman ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Landau dan Nurannisa (2018), yang menyimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi atau *e-government* memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Purnomo & Handayani, 2019). Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Indeks E-Government berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan indeks *e-government* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan teori isomorphism. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan dalam organisasi, termasuk pemerintah daerah, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh tekanan eksternal, dorongan untuk meniru organisasi lain, serta norma-norma profesional yang berlaku (Laksono, 2023).

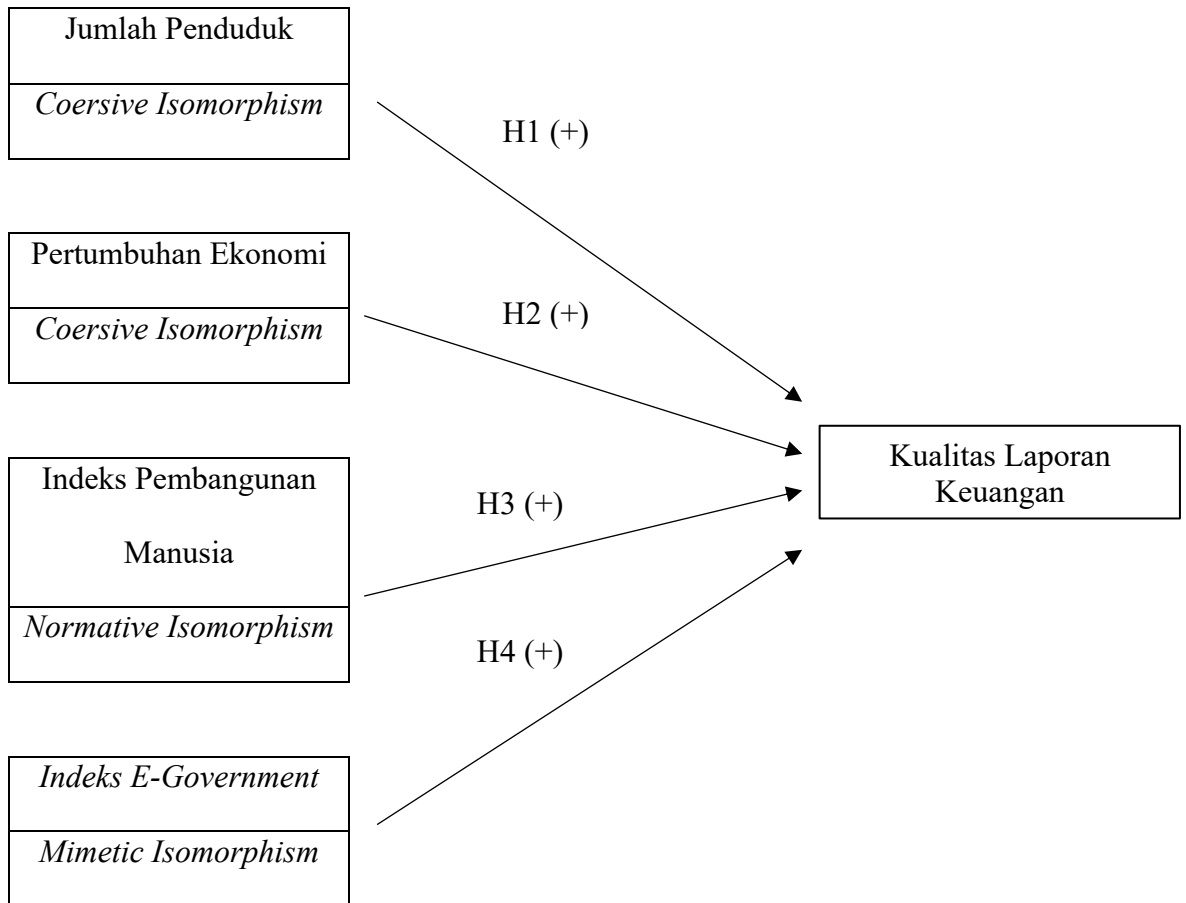
Dalam kerangka ini, variabel-variabel independen diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk isomorphism, yaitu *coercive isomorphism*, *mimetic isomorphism*, dan

normative isomorphism. Indeks *e-government* termasuk dalam *mimetic isomorphism* karena Indeks *e-government* termasuk dalam *mimetic isomorphism* karena penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan sering kali dilakukan sebagai respons terhadap ketidakpastian dan dorongan untuk meniru praktik terbaik dari daerah atau negara lain yang dianggap lebih sukses. Pertumbuhan ekonomi dikategorikan dalam *coersive isomorphism* karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali disertai dengan tekanan regulasi dan ekspektasi eksternal yang lebih besar terhadap organisasi, termasuk pemerintah daerah.. Sementara itu, jumlah penduduk dikategorikan dalam *coersive isomorphism* karena besarnya populasi suatu daerah dapat menimbulkan tekanan institusional yang kuat terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Indeks pembangunan manusia dimasukkan kedalam *normative isomorphism* karena mencerminkan kebutuhan akan peningkatan layanan publik dan dorongan profesionalisme dalam pengelolaan pemerintahan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis dan empiris mengenai bagaimana faktor-faktor eksternal dan norma-norma institusional dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui perantara seperti dokumen atau orang lain (Sugiyono, 2018). Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia secara publik, seperti laporan keuangan pemerintah daerah, situs resmi pemerintah daerah, serta laman Badan Pusat Statistik (BPS).

i. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017: 80), “populasi merupakan sekumpulan objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai fokus kajian untuk kemudian diambil kesimpulannya” (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga dapat diartikan terdapat 514 laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Menurut Wicaksono (2022:53), “sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang lebih besar (yakni populasi realistik) yang dipilih secara selektif”. Penggunaan sampel memudahkan peneliti untuk menangani kelompok yang lebih kecil dan lebih terkontrol dibandingkan keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan pengambilan. Metode *purposive sampling*

adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja atau dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria khusus yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga individu atau objek yang dipilih dianggap paling mampu memberikan informasi yang dibutuhkan (Wicaksono, 2022). Jumlah sampel tersebut dapat ditentukan melalui pendekatan statistik, salah satunya dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang diperlukan dari suatu populasi yang besar, terutama jika peneliti ingin menentukan ukuran sampel dengan mempertimbangkan batas toleransi kesalahan tertentu (Wibowo, 2016). Rumus solvin digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang diketahui, yaitu sebanyak 514 kabupaten/kota yang terdapat di Indonesia. Tingkat akurasi yang digunakan dalam penentuan sampel ditetapkan sebesar 10% karena jumlah populasi yang digunakan kurang dari 1000.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Pertimbangan ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi, kemudian dikuadratkan 10%.

Berdasarkan dari rumus Slovin, maka dapat dituliskan besar penarikan jumlah sampel pada penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{514}{1 + 514(0,1)^2}$$

$$= 83,71 \text{ (dibulatkan menjadi 84)}$$

Populasi dan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2021 dan 2023 yang diambil dari website resmi yang mudah diakses sebagai berikut:

1. *Website* resmi Badan Pusat Statistik yang menyediakan data mengenai jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan indeks pertumbuhan manusia.
2. *Website* resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyediakan data mengenai indeks *e-government*.
3. *Website* resmi Badan Pemeriksaan Keuangan setiap provinsi yang menyediakan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi pada tahun 2021 dan 2023.

3.2 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, variabel dependen yang diteliti yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, variabel independent yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan indeks *e-government*.

3.3.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah faktor yang memiliki pengaruh terhadap variabel lain yang dapat diamati atau diteliti. Beberapa ahli menjelaskan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang dapat diubah atau dimanipulasi dengan tujuan untuk mengetahui dampaknya terhadap variabel terikat, yaitu variabel yang menjadi fokus pengamatan atau penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independent adalah jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan indeks *e-government*.

3.3.1.1 Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia (2013), penduduk didefinisikan sebagai semua orang yang telah berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama minimal enam bulan, atau yang menetap kurang dari enam bulan namun berniat untuk tinggal. Sumber utama data kependudukan berasal dari sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Dalam pelaksanaannya, sensus mencakup pencacahan seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia, termasuk warga negara asing, kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Pada tahun-tahun di luar pelaksanaan sensus, data kependudukan diperoleh melalui proyeksi penduduk, yaitu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi terhadap komponen perubahan penduduk, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi (Dwiputrianti, 2011).

3.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya produksi barang dan jasa serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Keadaan ekonomi suatu wilayah dapat tercermin melalui laju pertumbuhan ekonominya. Salah satu indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode waktu tertentu (Raharja et al., 2017). Berikut adalah rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi.

$$Gt = \frac{(PDBt - PDBt - 1)}{PDBt - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

Gt = Pertumbuhan Ekonomi Periode t (triwulan atau tahunan)

PDB (t) = Produk Domestik Bruto Periode t (berdasarkan harga konstan)

PDB (t-1) = Produk Domestik Bruto Periode Sebelumnya

Dalam penelitian ini data Pertumbuhan Ekonomi diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tanpa menghitung sendiri.

3.3.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan masyarakat dengan tingkat pembangunan yang memadai. Semakin tinggi tingkat pembangunan masyarakat, semakin beragam pula kebutuhan dan harapan yang ingin dipenuhi, termasuk dorongan terhadap transparansi dan penyajian laporan keuangan

pemerintah daerah secara lebih rinci. IPM dinyatakan dalam bentuk persentase (Najah, 2019). Data Indeks Pembangunan Manusia untuk setiap provinsi di Indonesia diperoleh dengan mengunduh dari website Badan Pusat Statistik di www.bps.go.id. Untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia dapat dinyatakan dengan:

$$IPM = Indeks\ Pembangunan\ Manusia$$

3.3.1.4 Indeks *E-Government*

E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan agar berjalan lebih efisien. Sementara itu, menurut Lallana et al. (2002) dalam penelitiannya, *e-government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah daerah dalam rangka mentransformasi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pelaku usaha, dan aparatur negara. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Wulandari & Bandi, 2015).

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen, atau variabel yang menjadi fokus pengamatan dalam suatu penelitian. Biasanya, variabel ini diukur untuk melihat sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas. Dalam konteks penelitian ini, variabel dependen yang diteliti adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencakup aspek kejelasan dan transparansi informasi yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku, konsistensi serta keandalan data dalam laporan, dan kecukupan dalam akuntansi serta pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur berdasarkan opini audit yang diberikan. Jika suatu pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka diberikan skor 1. Sebaliknya, jika memperoleh opini selain WTP, maka diberikan skor 0. Penggunaan data *dummy* skala 0–1 dalam penelitian ini bertujuan untuk menyederhanakan variabel kategori menjadi bentuk numerik yang dapat diolah secara statistik dalam model regresi. Pemilihan skala 0–1 dilakukan karena penelitian ini berfokus pada perbedaan utama antara opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan jenis opini lainnya, mengingat WTP dianggap sebagai indikator tertinggi dalam kualitas laporan keuangan pemerintah.

Selain itu, pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian terdahulu yang menggunakan regresi linier atau regresi logistik untuk menganalisis pengaruh variabel kategorik terhadap variabel dependen numerik. Dengan mengubah opini BPK menjadi *dummy*, model menjadi lebih sederhana dan hasilnya lebih mudah diinterpretasikan secara praktis.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses pengolahan dan pengelolaan data untuk memperoleh informasi yang berguna dalam menjawab pertanyaan penelitian atau sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan melibatkan beberapa jenis pengujian, antara lain:

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan indeks *e-government* dalam kaitannya dengan kualitas lapoan keuangan pemerintah. Melalui analisis statistik deskriptif, dapat diketahui nilai-nilai seperti ukuran pemusatan data (rata-rata/mean), ukuran penyebaran data (standar deviasi), varians, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total (sum), rentang (range), dan varian (Ghozali, 2016).

Metode ini menggunakan penyajian data dalam bentuk tabel dan menghitung nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi. Namun, perlu diingat bahwa statistik deskriptif tidak digunakan untuk menguji hipotesis, melainkan berfungsi untuk menyajikan dan menganalisis data dengan menghitung karakteristik dari data tersebut agar dapat dipahami dengan lebih jelas.

3.4.2 Metode Analisis Regresi Logistik

Metode regresi logistik adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk memperkirakan probabilitas terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa berdasarkan variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi logistik mencakup empat tahap pengujian, yaitu evaluasi model secara keseluruhan (overall model fit), uji kelayakan model (goodness of fit test), pengukuran koefisien determinasi, serta pembentukan model regresi logistik itu sendiri.

3.4.2.1 Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Pengujian overall model fit dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan statistik yang didasarkan pada fungsi Likelihood. Nilai Likelihood (L) dari model mencerminkan probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan sesuai dengan data yang diamati. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, nilai Likelihood (L) diubah menjadi bentuk -2 Log Likelihood. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai -2 Log Likelihood pada block number = 0 dengan nilai -2 Log Likelihood pada block number = 1. Jika nilai -2 Log Likelihood awal (block number = 0) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai setelahnya (block number = 1), maka penurunan tersebut menunjukkan bahwa model regresi memberikan hasil yang lebih baik. Adapun hipotesis yang digunakan untuk menilai keseluruhan model ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_1 = Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

3.4.2.2 Menguji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Uji goodness of fit atau kelayakan model regresi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode Hosmer and Lemeshow. Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis nol, yaitu apakah data empiris sesuai dengan model yang dibangun. Adapun pengambilan keputusan berdasarkan hasil uji adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi Hosmer and Lemeshow $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak. Ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara model dan data observasi, sehingga model tidak mampu memprediksi data observasi dengan baik.
- b. Jika nilai signifikansi Hosmer and Lemeshow $\geq 0,05$, maka H_0 diterima. Hal ini berarti model cocok dengan data observasi, sehingga model dapat digunakan untuk memprediksi nilai observasi secara layak.

3.4.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dalam analisis ini dilihat melalui nilai Nagelkerke R Square. Nilai ini merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell, yang dirancang agar memiliki rentang antara 0 hingga 1. Jika Nagelkerke R Square bernilai rendah atau mendekati nol, hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilainya mendekati satu, maka variabel independen dianggap mampu memberikan penjelasan yang kuat terhadap variabel dependen.

3.4.2.4 Analisis Regresi Logistik

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen (input) dengan variabel dependen yang bersifat dikotomik, yaitu memiliki dua kemungkinan hasil (misalnya 0 dan 1). Adapun bentuk umum dari persamaan regresi logistik adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

X_1 = Jumlah Penduduk

X_2 = Pertumbuhan Ekonomi

X_3 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X_4 = Indeks *E-Government*

e = Error

3.4.3 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya belum tentu sesuai dengan hasil penelitian, di mana hipotesis disusun dalam bentuk pernyataan. Disebut sementara karena hipotesis masih didasarkan pada teori yang relevan dan belum didukung oleh fakta-fakta dari hasil pengumpulan data. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan pengujian hipotesis menggunakan Uji Parsial (t-test).

3.4.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji parsial (uji t). Uji parsial bertujuan untuk memahami dugaan terhadap hipotesis yang telah dirumuskan, dengan mengkaji pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian uji t dilakukan dengan menilai nilai signifikansinya. Penelitian ini bertujuan untuk

menguji apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan indeks *e-government* terhadap kualitas laporan keuangan. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 99 data kabupaten/kota di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut yaitu 2021 sampai 2023. Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai dasar informasi untuk menjawab topik pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 27.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan indeks *e-government* sebagai variabel independent, serta kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Variabel tersebut telah diuji secara statistik deskriptif seperti pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Jumlah Penduduk	297	38964	5627021	621385.46	828384.508
Pertumbuhan Ekonomi	297	-6.74	29.85	4.3695	2.53264
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	297	56.13	88.32	73.2864	6.35483
Indeks <i>E-Government</i>	297	1.00	4.49	2.2620	.72708
Kualitas LK Pemda	297	0	1	.79	.407

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 27, 2025.

Hasil analisis statistik deskriptif adalah sebagaimana diringkas pada Tabel 4.1 tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1, diketahui bahwa jumlah penduduk memiliki nilai minimum sebesar 38.964 dan maksimum 5.627.021, dengan rata-rata sebesar 621.385,46 dan standar deviasi 828.384,508. Daerah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak. Sementara itu, daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu, Kabupaten Bogor.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan nilai minimum sebesar -6,74 dan maksimum 29,85, dengan rata-rata sebesar 4,3695 dan standar deviasi 2.53264. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling sedikit, yaitu Kabupaten Badung. Sementara itu, daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu, Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1, diketahui bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki nilai minimum sebesar 56,13 dan maksimum 88,32, dengan rata-rata sebesar 73,2864 dan standar deviasi 6,35483. Daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) paling sedikit, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak. Sementara itu, daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) terbanyak, yaitu, Kota Banda Aceh.
4. Variabel *Indeks E-Government* berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1, diketahui bahwa *Indeks E-Government* memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dan maksimum 4,49, dengan rata-rata sebesar 2,2620 dan

standar deviasi 0.72708. Daerah yang memiliki *Indeks E-Government* paling sedikit, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak, Kota BauBau, Kabupaten Kaur, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Donggala, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu. Sementara itu, daerah dengan *Indeks E-Government* terbanyak, yaitu Kota. Surabaya.

5. Variabel dependen berupa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur berdasarkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 sampai 2023. Penilaian ini dikategorikan ke dalam skala dua angka, yaitu: apabila daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka diberikan skor 1; sebaliknya, jika tidak memperoleh opini WTP (non-WTP), maka diberikan skor 0. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang ditampilkan pada Tabel 4.1, diketahui bahwa nilai minimum adalah 0 dan maksimum 1, dengan nilai rata-rata sebesar 0,79 serta standar deviasi sebesar 0,407. Terdapat 24 kabupaten/kota yang memperoleh nilai minimum atau mendapat opini non-WTP, yaitu Banggai Kepulauan, Bekasi, Belu, Bengkayang, Bogor, Buru Selatan, Donggala, Jeneponto, Kapuas, Kaur, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Meranti, Konawe Selatan, Kupang, Kutai Timur, Lampung Utara, Langkat, Mamasa, Manokwari, Mappi, Murung Raya, Parigi Moutong, Pemalang, Penajam Paser Utara, Pulau Taliabu, Seluma, Seram Bagian Barat, Sumbawa, Kota Ambon, Kota Bandar Lampung, Kota Binjai, Kota Palembang.

4.2 Metode Analisis Regresi Logistik

4.2.1 Menguji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Kriteria pengujian *Overall Model Fit* ditentukan berdasarkan perbandingan antara nilai *-2 Log Likelihood* dengan nilai *Chi-square* pada tabel. Jika *-2 Log Likelihood* lebih kecil dari nilai *Chi-square* tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi syarat kelayakan uji. Sebaliknya, jika *-2 Log Likelihood* lebih besar dari nilai *Chi-square* tabel, maka data dianggap tidak memenuhi syarat uji. Adapun hasil pengujian *Overall Model Fit* disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 *Iteration History*

<i>-2 Log Likelihood</i> <i>(number = 0)</i>	304.307
<i>-2 Log Likelihood</i> <i>(number = 1)</i>	261.614

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 27, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2, diperoleh nilai *-2 Log Likelihood* pada block number = 0 sebesar 304.307. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai *Chi-square* tabel, yang dihitung menggunakan rumus $Df = n - 1$ ($297 - 1$), sehingga diperoleh nilai *Chi-square* tabel sebesar 337.125. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *-2 Log Likelihood* block number = 0 < *Chi-square* tabel, atau $304.307 < 337.125$, yang berarti data telah memenuhi syarat uji meskipun variabel independen belum dimasukkan.

Setelah memasukkan variabel independen, diperoleh nilai signifikansi *-2 Log Likelihood* pada block number = 1 sebesar 261.614. Nilai ini juga lebih kecil

dari Chi-square tabel yang dihitung dengan $Df = n - K - 1$ ($297 - 4 - 1$), sehingga menghasilkan nilai Chi-square sebesar 332.854. Maka dapat disimpulkan bahwa $-2 \text{ Log Likelihood block number} = 1 < \text{Chi-square tabel}$, atau $261.614 < 332.854$. Selain itu, nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ pada block number = 1 mengalami penurunan dibandingkan dengan block number = 0, yang menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun lebih baik dan sesuai dengan data yang diamati (fit).

4.2.2 Menguji Kelayakan Model Regresi (*Goodness Fit Test*)

Pengujian kelayakan model regresi menggunakan *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test*.

Tabel 4.3 *Hosmer and Lemeshow Test*

Chi-square	df	Sig.
4.833	8	.775

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 27, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,775. Sesuai dengan kriteria pengujian, nilai signifikansi yang melebihi 0,05 menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena itu, merujuk pada Tabel 4.3, karena nilai signifikansi sebesar $0,775 \geq 0,05$, maka H_0 diterima, yang berarti model dinilai sesuai dengan data observasi.

4.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur sejauh mana proporsi variasi data dapat dijelaskan oleh model. Nilai koefisien ini berada dalam rentang 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1, maka semakin baik tingkat kecocokan model terhadap data.

Tabel 4.4 *Model Summary*

Step	-2Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	261.614	.134	.209

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 27, 2025.

Mengacu pada Tabel 4.4, nilai *Nagelkerke R Square* yang diperoleh sebesar 0,209. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan indeks *e-government* dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hanya sebesar 20,9% Sementara itu, sisanya sebesar 79,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

4.2.4 Analisis Regresi Logistik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk mengkaji pengaruh variabel jumlah penduduk (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), indeks pembangunan manusia (IPM) (X3), dan Indeks E-Government (X4 terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021- 2023.

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Logistik

	β	S.E.	Wald	df	Sig.
Step 1 ^a					
X1	.000	.000	7.631	1	.006
X2	.015	.071	.042	1	.838
X3	.134	.032	17.353	1	.000
X4	.656	.286	5.252	1	.022
Constant	-9.409	2.156	19.049	1	.000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 27, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, maka diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -9.409 + 0.000 X_1 + 0.015 X_2 + 0.134 X_3 + 0.656 X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan model regresi logistik di atas, dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- Nilai konstanta (α) sebesar -9.409 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen berada dalam kondisi tetap (konstan), maka nilai variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, adalah sebesar -9.409.
- Variabel jumlah penduduk (X_1) memiliki nilai koefisien (β) sebesar 0.000. Hal ini berarti bahwa jika jumlah penduduk meningkat sebanyak 1 satuan,

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,000.

- c. Variabel pertumbuhan ekonomi (X2) memiliki koefisien (β) sebesar 0.015, yang berarti bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 satuan dan variabel lainnya tidak berubah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.015.
- d. Variabel indeks pembangunan manusia (IPM) (X3) memiliki koefisien (β) sebesar 0.134, yang berarti bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 satuan dan variabel lainnya tidak berubah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.134.
- e. Variabel indeks *e-government* (X4) memiliki koefisien (β) sebesar 0.656, yang berarti bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 satuan dan variabel lainnya tidak berubah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.656.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Parsial T

Uji parsial t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen, yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan indeks *e-government*, memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka variabel tersebut dianggap berpengaruh secara parsial dan hipotesis diterima.

Tabel 4.6 *Variable In The Equation*

	β	S.E.	Wald	df	Sig.
Step X1	.000	.000	7.631	1	.006
1 ^a X2	.015	.071	.042	1	.838
X3	.134	.032	17.353	1	.000
X4	.656	.286	5.252	1	.022
	-9.409	2.156	19.049	1	.000
Constant					

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 27, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa:

- a. Variabel jumlah penduduk (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, atau hipotesis H1 didukung.
- b. Variabel pertumbuhan ekonomi (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,838, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,838 \geq 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, atau hipotesis H2 tidak didukung.
- c. Variabel indeks pembangunan manusia (IPM) (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan

manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, atau hipotesis H3 didukung.

- d. Variabel indeks *e-government* (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,02, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,02 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks *e-government* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, atau hipotesis H4 didukung.

Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesa	Deskriptif	β	Sig. (P-value)	Hasil
H1	Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	.000	0.006	Didukung
H2	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	0.015	0.838	Tidak didukung
H3	Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	0.134	0.000	Didukung
H4	Indeks <i>e-government</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	0.656	0.022	Didukung

4.4 Pembahasan Uji Hipotesis

4.4.1 Pengaruh jumlah penduduk terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ketiga (H1) didukung atau diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien (β) sebesar 0.000 dan nilai signifikansi (P-value) sebesar 0,006, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Dengan demikian, jumlah penduduk terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori institusional, menurut peneliti jumlah penduduk termasuk dalam *coercive isomorphism* karena adanya tekanan eksternal yang berasal dari peraturan pemerintah pusat maupun tuntutan masyarakat yang mengharuskan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas publik. Jumlah penduduk yang besar menimbulkan kebutuhan pelayanan publik yang lebih kompleks dan beragam, sehingga pemerintah daerah berada dalam posisi yang tertekan untuk mematuhi regulasi, standar pelaporan keuangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola. Tekanan tersebut bersifat koersif karena datang dari kekuatan eksternal yang memiliki otoritas atau pengaruh, seperti pemerintah pusat dan masyarakat, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk beradaptasi demi memperoleh legitimasi. Dengan demikian, temuan ini didukung oleh teori institusional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Naopal et al., 2017) dimana dalam penelitian tersebut jumlah penduduk terbukti dapat memengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Alfi & Sari, 2023) yaitu jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penduduk yang sebagian besar berpenghasilan rendah dan tidak patuh pajak menyebabkan kontribusi terhadap PAD rendah. Sementara itu, tuntutan pelayanan publik meningkat seiring bertambahnya penduduk, namun tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan yang memadai. Kurangnya partisipasi masyarakat juga membuat pengelolaan keuangan kurang optimal, sehingga jumlah penduduk yang besar justru menekan kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.2 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis kedua (H2) tidak didukung. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi (β) sebesar 0.015 dan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.838, yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besar atau kecilnya pertumbuhan ekonomi tidak terbukti secara statistik memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam kerangka teori institusional, pertumbuhan ekonomi dikategorikan sebagai bagian dari *coercive isomorphism* karena seharusnya semakin tinggi

pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan tekanan eksternal yang memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan sistem pengelolaan keuangannya. Tekanan ini terutama datang dari pemerintah pusat dan lembaga pengawas, seiring dengan meningkatnya ekspektasi terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Tetapi temuan ini tidak didukung oleh teori institusional, hal ini mungkin disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia dan sistem yang belum optimal dalam merespons dampak dari pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh naik turunnya pertumbuhan ekonomi karena laporan keuangan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, bukan kondisi ekonomi. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang harus dipatuhi, terlepas dari kondisi ekonomi. Jadi, meskipun ekonomi naik atau turun, kualitas penyusunan, penyajian, dan audit laporan keuangan tetap harus sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Heryanti et al., 2019) dan (Raharja et al., 2017) dimana dalam penelitian tersebut pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tidak sejalan juga dengan penelitian (Nurhayati & Hamzah, 2020) dimana hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.3 Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ketiga (H3) didukung atau diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien (β) sebesar 0.134 dan nilai signifikansi (*P-value*) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Dengan demikian, indeks pembangunan manusia (IPM) terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori institusional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk dalam *normative isomorphism* karena mencerminkan tekanan yang muncul dari nilai-nilai profesionalisme, norma sosial, dan ekspektasi moral yang berkembang dalam lingkungan institusional. Temuan ini didukung oleh teori institusional, karena pemerintah daerah terdorong untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola publik sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dalam rangka mendukung pembangunan manusia, yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Tekanan ini bersifat normatif karena berasal dari norma dan standar profesional, baik dari asosiasi profesi, akademisi, maupun masyarakat luas, yang menuntut praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik guna mendukung pencapaian IPM yang tinggi. Dengan demikian, peningkatan IPM menstimulasi pemerintah daerah untuk berperilaku sesuai dengan harapan profesional dan etika institusional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Setyowati, 2016) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Serta sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Munzir et al., 2022) yaitu indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aggatha et al., 2023) (Puspa & Rahayu, 2019).

4.4.4 Pengaruh indeks *e-governmnet* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa indeks *e-governmnet* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ketiga (H4) didukung atau diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien (β) sebesar 0.656 dan nilai signifikansi (*P-value*) sebesar 0,022, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Dengan demikian, indeks *e-governmnet* terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori institusional, indeks *e-government* termasuk dalam *mimetic isomorphism* karena mendorong pemerintah daerah untuk meniru praktik digitalisasi dan teknologi informasi dari daerah lain yang dianggap lebih maju atau berhasil dalam implementasi *e-government*. Temuan ini didukung oleh teori institusional karena ketika menghadapi ketidakpastian dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi, pemerintah daerah cenderung mengadopsi

sistem, aplikasi, atau kebijakan digital yang telah diterapkan oleh daerah lain dengan nilai indeks *e-government* yang tinggi. Peniruan ini dilakukan bukan karena tekanan regulasi (*coercive*) atau norma profesional (*normative*), melainkan karena adanya dorongan internal untuk memperoleh hasil serupa dan meningkatkan legitimasi institusional melalui modernisasi berbasis teknologi seperti yang dilakukan oleh daerah lain yang dianggap sebagai role model.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Purnomo & Handayani, 2019) yang menunjukkan bahwa indeks *e-government* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan juga dengan penelitian (Syamsul & Zuhroh, 2021) yang menunjukkan bahwa indeks *e-government* berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan indeks *e-governmnet* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tekanan ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan guna memenuhi harapan publik.
2. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah, hal tersebut tidak secara otomatis meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini bisa disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan pertumbuhan ekonomi untuk perbaikan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan IPM mencerminkan dorongan normatif bagi pemerintah daerah untuk lebih

profesional dan bertanggung jawab dalam tata kelola keuangan, karena kesejahteraan masyarakat yang meningkat menuntut pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan berkualitas.

4. Indeks *E-Government* juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik mendorong efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Pemerintah daerah yang mengadopsi teknologi informasi cenderung memiliki sistem pelaporan yang lebih baik dan sesuai dengan standar akuntansi serta regulasi yang berlaku.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dan interpretasi temuan, yaitu:

1. Tidak seluruh pemerintah daerah menyediakan data yang lengkap dan terperinci dalam laporan tahunannya.
2. Beberapa data yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak tersedia dalam format yang seragam, sehingga menyulitkan proses analisis data.
3. Terdapat kendala dalam memperoleh data terbaru atau data historis yang konsisten dari pemerintah daerah.
4. Penelitian ini hanya menggunakan data *dummy* untuk variabel dependennya, sehingga informasi yang ditangkap menjadi terbatas karena hanya dibagi menjadi dua kategori (0-1).

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan implementasi *e-government*. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi berjalan optimal serta memperkuat peran sumber daya manusia dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai standar.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk tidak hanya menggunakan data sekunder, tetapi juga melengkapi dengan data primer seperti wawancara atau kuesioner terhadap aparat pemerintah daerah agar memperoleh gambaran yang lebih dalam mengenai praktik pelaporan keuangan. Selain itu, dapat dipertimbangkan pula penambahan variabel lain yang relevan, seperti kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, atau peran audit internal. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengolah data kategorik seperti opini BPK, misalnya dengan menggunakan skala ordinal (WTP = 4, WDP = 3, TW = 2, TMP = 1).
3. Bagi akademisi dan pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang kebijakan penguatan tata kelola keuangan daerah, terutama dalam menghadapi dinamika sosial dan teknologi yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan *e-government* serta pembangunan

manusia seharusnya menjadi prioritas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Daftar Pustaka

- Aggatha, N. P., Rahayu, S., & Inawati, W. A. (2023). The Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Opini Audit, Kompleksitas Pemerintah dan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 307–316. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2849>.
- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1098–1114. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.750>.
- Azahari, A. Y. P., & Sulardi, S. (2021). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Ukuran Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 294–304.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75.
- Dwiputrianti, S. (2011). *Effectiveness of Public Sector Audit Reports in Indonesia (Preceding and Following Audit Reform)*. 1–381.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. <https://perpus.petra.ac.id/catalog/site/detail?id=149488>.
- Harahap, A. M., & Zenabia, T. (2024). Determinan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Jakarta Islamic Index). *Jurnal Economina*, 3(3), 465–476. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i3.1234>.
- Hendri, Z., & Yafiza, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 56–66. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216>.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 25–33.
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1).

<https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>

- Hidayat, D., Sari, M., AR, F., & Azizah, K. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Valuta*, 7(1), 1–13. <http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/16148>.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Symposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26.
- Ishak, P., & Syam, F. (2020). Pengaruh kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 120–130. <https://jtebr.unisan.ac.id/index.php/jtebr/article/view/45%0Ahttps://jtebr.unisan.ac.id/index.php/jtebr/article/download/45/12>.
- Laksono. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Jember. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(5), 3155–3170. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.586>.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Leverage pada Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18–32. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v2i2.3463>.
- Najah, U. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemda, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Kualitas Hasil Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Lkpd. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 4(2), 70–88. <https://doi.org/10.52062/keuda.v4i2.884>.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh karaktersitik daerah, jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 56–68.
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 22–34. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>.
- Purnomo, A. Y. P., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Good Governance Dan E-Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–20.
- Puspa, A., & Rahayu, S. (2019). Keuangan Pemerintah Daerah melalui Website Resmi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia pada Tahun 2019) The Effect of Regional Property, Administrative Age and

- Human Development Index on Disclosure of Local Government Fin. *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5082–5089.
- Putra, R., Ardhiarisca, O., Rina Wijayanti, R., & Yudha Pratiwi, B. (2018). Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 18(Sentika), 23–24.
- Raharja, A. K. Y., Suharno, & Harimurti, F. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus di Wilayah Soloraya Periode 2013 – 2015). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 13(1), 198 – 204. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i4.3737>.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>.
- Romy, E., Se, B. A., & Ardansyah, M. (2022). *Teori dan perilaku Organisasi*. umsu press.
- Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004–2014. *Jurnal Pembangunan Dan Keuangan Daerah*, 18(2), 115899.
- Sari, & Winarno. (2012). JEAM Vol XI No. 1/2012 1. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, XI(1), 1–19.
- Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Esensi*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3120>.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 184–205. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10>.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: Perspektif ismorfisma institusional. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 153–173. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art6>.
- Sugiyono. (2018). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*, 62, 70.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48–61.
- Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni, E. (2023). Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi e-Government dan Hambatannya). *Journal Social Society*, 3(2), 80–94. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.338>.

- Syamsul, & Zuhroh. (2021). Implementasi E-Government : Dampaknya Pada Transparansi. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 1–10.
- Utami, S. R. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 253–263. www.jab.fe.uns.ac.id.
- Wicaksono, A. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pengantar Ringkas*. Garudhawaca.
- Widiawaty. (2016). Aspek Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara pada Kementerian/Lembaga Dihubungkan dengan Prinsip Good Governance Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 6(1), 1–11.
- Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 148. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.184>.

LAMPIRAN

Lampiran Data Penelitian

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN EKONOMI	IPM	INDEKS E- GOVERNMENT	OPINI BPK
KOTA PEMATANGSIANTAR	2021	270.768	1,25	79,17	1,53	1
KOTA PEMATANGSIANTAR	2022	274.056	3,47	79,71	2,35	1
KOTA PEMATANGSIANTAR	2023	274.838	4,22	80,46	2,84	1
KABUPATEN LANGKAT	2021	1.034.519	3,08	73,5	2,36	0
KABUPATEN LANGKAT	2022	1.039.926	4,69	74,03	3,02	0
KABUPATEN LANGKAT	2023	1.066.711	4,93	74,33	3,03	0
KOTA BINJAI	2021	295.361	2,23	76,57	1,67	1
KOTA BINJAI	2022	300.009	4,18	77,5	1,82	0
KOTA BINJAI	2023	303.272	4,75	78,11	2,98	1
KABUPATEN SIJUNJUNG	2021	237.313	3,14	70,48	1,88	1
KABUPATEN SIJUNJUNG	2022	240.317	3,93	71,32	2,21	1
KABUPATEN SIJUNJUNG	2023	243.700	4,26	72,3	2,18	1
KOTA PARIAMAN	2021	95.294	3,51	78,72	2,42	1
KOTA PARIAMAN	2022	96.719	4,53	79,31	2,67	1
KOTA PARIAMAN	2023	97.200	4,79	79,76	2,65	1
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	2021	88.389	2,87	63,98	1,18	0
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	2022	89.401	4,94	64,83	1,26	1
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	2023	91.400	4,04	65,79	1,53	1
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	2021	338.024	3,75	72,4	2,96	1
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	2022	341.874	4,75	72,78	2,96	1
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	2023	345.610	2,87	73,35	2,96	1

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	2021	207.802	2,56	67,59	1,19	1
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	2022	209.817	3,17	68,31	2,12	0
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	2023	211.791	4,81	68,96	2,74	0
KOTA PEKANBARU	2021	994.582	5,24	82,93	2,17	1
KOTA PEKANBARU	2022	1.005.658	6,78	83,38	2,83	1
KOTA PEKANBARU	2023	1.016.366	6,06	83,67	3,42	1
KABUPATEN BANYUASIN	2021	843.871	3,84	69,15	2	1
KABUPATEN BANYUASIN	2022	852.576	5,32	69,95	1,86	1
KABUPATEN BANYUASIN	2023	874.210	5,06	70,67	1,05	1
KOTA PALEMBANG	2021	1.668.848	3,11	80,46	2,66	1
KOTA PALEMBANG	2022	1.707.996	5,25	81,19	2,66	0
KOTA PALEMBANG	2023	1.706.371	5,12	81,72	2,66	1
KABUPATEN MUSI RAWAS	2021	398.732	2,33	69,26	2	1
KABUPATEN MUSI RAWAS	2022	402.674	4,06	70,04	1,92	1
KABUPATEN MUSI RAWAS	2023	407.694	4,03	70,52	2,64	1
KABUPATEN LAMPUNG UTARA	2021	634.117	2,82	69,78	1,86	0
KABUPATEN LAMPUNG UTARA	2022	635.129	3,16	70,19	2,43	0
KABUPATEN LAMPUNG UTARA	2023	635.903	4,22	70,78	2,7	1
KOTA BANDAR LAMPUNG	2021	1.184.949	3,12	78,93	1,2	0
KOTA BANDAR LAMPUNG	2022	1.209.937	4,93	79,33	1,53	0
KOTA BANDAR LAMPUNG	2023	1.234.998	4,99	79,86	2,15	1
KABUPATEN TULANG BAWANG	2021	427.152	2,88	70,28	2	1
KABUPATEN TULANG BAWANG	2022	431.208	3,85	71,08	2,12	1
KABUPATEN TULANG BAWANG	2023	431.623	4,27	71,56	2,55	1
KOTA PANGKALPINANG	2021	221.988	9,26	79,12	2,1	1

KOTA PANGKALPINANG	2022	226.297	6,21	79,77	2,22	1
KOTA PANGKALPINANG	2023	227.336	5,32	80,45	2,87	1
KABUPATEN BELITUNG	2021	184.004	5,62	73,01	2,4	1
KABUPATEN BELITUNG	2022	186.331	5,71	73,83	3,02	1
KABUPATEN BELITUNG	2023	189.225	5,75	74,49	3,11	1
KABUPATEN BELITUNG TIMUR	2021	128.564	4,56	71,91	2,15	1
KABUPATEN BELITUNG TIMUR	2022	130.463	3,79	72,76	2,7	1
KABUPATEN BELITUNG TIMUR	2023	131.281	4,72	73,31	3,56	1
KOTA BATAM	2021	1.215.140	4,75	81,82	2,64	1
KOTA BATAM	2022	1.236.010	6,84	82,25	2,85	1
KOTA BATAM	2023	1.256.610	7,04	82,64	3,77	1
KABUPATEN NATUNA	2021	81.952	0,02	77,33	2,24	1
KABUPATEN NATUNA	2022	82.824	0,11	77,59	2,5	1
KABUPATEN NATUNA	2023	83.450	0,96	78,23	3,19	1
KOTA TANJUNGPINANG	2021	233.367	0,59	79,98	2,29	1
KOTA TANJUNGPINANG	2022	239.854	4,12	80,58	1,85	1
KOTA TANJUNGPINANG	2023	234.840	4,92	81,14	2,81	1
KABUPATEN SIDOARJO	2021	2.091.930	4,21	81,01	2,37	1
KABUPATEN SIDOARJO	2022	2.103.401	7,53	81,37	2,29	1
KABUPATEN SIDOARJO	2023	2.114.588	6,16	81,88	3,11	1
KOTA SURABAYA	2021	2.880.284	4,29	82,94	3,16	1
KOTA SURABAYA	2022	2.887.223	6,51	83,32	3,72	1
KOTA SURABAYA	2023	2.893.689	5,7	83,99	4,49	1
KABUPATEN GRESIK	2021	1.320.570	3,79	76,98	3,31	1
KABUPATEN GRESIK	2022	1.332.664	7,38	77,62	3,27	1
KABUPATEN GRESIK	2023	1.334.648	4,62	78,44	4,28	1
KABUPATEN PEMALANG	2021	1.484.209	4,28	66,64	2,49	1

KABUPATEN PEMALANG	2022	1.500.754	5,08	67,26	2,23	0
KABUPATEN PEMALANG	2023	1.523.622	4,14	68,08	2,94	1
KABUPATEN MAGELANG	2021	1.305.512	3,48	70,23	2,67	1
KABUPATEN MAGELANG	2022	1.312.573	5,46	70,96	3,13	1
KABUPATEN MAGELANG	2023	1.330.656	5,04	71,56	3,13	1
KABUPATEN KLATEN	2021	1.267.272	3,82	76,12	2,74	1
KABUPATEN KLATEN	2022	1.275.850	5,9	76,95	2,74	1
KABUPATEN KLATEN	2023	1.284.386	5,7	77,59	3,7	1
KABUPATEN KULON PROGO	2021	442.724	4,37	74,73	3,22	1
KABUPATEN KULON PROGO	2022	448.131	6,58	75,48	3,23	1
KABUPATEN KULON PROGO	2023	453.584	5,65	75,82	4,08	1
KABUPATEN SLEMAN	2021	1.265.429	5,61	84,08	2,55	1
KABUPATEN SLEMAN	2022	1.282.804	5,15	84,4	3,19	1
KABUPATEN SLEMAN	2023	1.300.361	5,09	84,86	4,29	1
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2021	767.464	5,31	70,37	2,49	1
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2022	776.705	5,37	71,18	2,62	1
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2023	786.023	5,04	71,46	2,84	1
KABUPATEN PANDEGLANG	2021	1.284.640	3,1	69,02	1,95	1
KABUPATEN PANDEGLANG	2022	1.298.350	3,47	69,7	2,5	1
KABUPATEN PANDEGLANG	2023	1.312.770	2,53	70,28	3,14	1
KABUPATEN SERANG	2021	1.640.110	3,74	71,05	2,64	1
KABUPATEN SERANG	2022	1.661.370	5,04	71,99	2,64	1
KABUPATEN SERANG	2023	1.682.130	4,8	72,63	3,23	1
KOTA TANGERANG	2021	1.912.030	3,9	80,08	3,4	1
KOTA TANGERANG	2022	1.931.640	5,98	80,44	2,6	1
KOTA TANGERANG	2023	1.950.580	5,57	80,98	2,97	1
KABUPATEN KUPANG	2021	369.487	2,75	66,08	1,6	0
KABUPATEN KUPANG	2022	373.259	2,74	66,72	1,85	1
KABUPATEN KUPANG	2023	376.837	3,55	67,51	1,91	1

KABUPATEN MALAKA	2021	186.006	1,95	62,97	1,31	1
KABUPATEN MALAKA	2022	188.493	3,73	63,84	1,99	1
KABUPATEN MALAKA	2023	190.994	3,77	64,5	2,07	1
KABUPATEN BELU	2021	221.605	1,75	66,4	1,88	0
KABUPATEN BELU	2022	226.307	3,19	66,87	1,95	1
KABUPATEN BELU	2023	231.008	3,76	67,5	2,29	1
KABUPATEN BENGKAYANG	2021	289.967	4,33	68,04	1,76	0
KABUPATEN BENGKAYANG	2022	294.503	5,45	68,74	1,87	1
KABUPATEN BENGKAYANG	2023	298.979	4,68	69,53	2,46	1
KABUPATEN KAPUAS HULU	2021	255.487	4,43	65,98	2,37	1
KABUPATEN KAPUAS HULU	2022	258.989	4,51	66,91	2,76	1
KABUPATEN KAPUAS HULU	2023	262.404	4,62	67,86	2,78	1
KABUPATEN KETAPANG	2021	577.188	5,23	68,39	1,2	1
KABUPATEN KETAPANG	2022	584.946	5,42	68,86	1,91	1
KABUPATEN KETAPANG	2023	592.521	1,1	69,61	3	1
KABUPATEN KAPUAS	2021	414.823	4,71	71,34	1,66	1
KABUPATEN KAPUAS	2022	420.060	7,04	71,72	1,86	0
KABUPATEN KAPUAS	2023	425.186	5,71	72,4	2,21	0
KOTA PALAGKARAYA	2021	297.002	4,32	81,22	2,11	1
KOTA PALAGKARAYA	2022	301.417	6,25	81,47	2,66	1
KOTA PALAGKARAYA	2023	305.797	6,57	81,95	3,03	1
KABUPATEN MURUNG RAYA	2021	113.019	4,38	69,67	1,56	1
KABUPATEN MURUNG RAYA	2022	114.831	7,03	70,13	1,8	1
KABUPATEN MURUNG RAYA	2023	116.621	5,46	70,91	2,44	0
KABUPATEN KUTAI TIMUR	2021	440.290	-0,89	74,15	1,03	0
KABUPATEN KUTAI TIMUR	2022	447.940	5,58	74,69	2,82	1
KABUPATEN KUTAI TIMUR	2023	455.500	7,71	75,33	3,2	1

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	2021	180.590	-1,69	73,01	2,14	0
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	2022	188.900	14,49	73,56	1,82	0
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	2023	197.630	29,85	74,33	2,85	1
KOTA SAMARINDA	2021	835.150	2,78	81,05	2,46	1
KOTA SAMARINDA	2022	843.010	6,6	81,72	2,44	1
KOTA SAMARINDA	2023	850.630	8,62	82,61	3,14	1
KOTA MANADO	2021	453.180	5,15	80,53	1,84	1
KOTA MANADO	2022	454.610	5,64	80,96	1,84	1
KOTA MANADO	2023	458.580	5,52	81,4	2,95	1
KOTA MINAHASA UTARA	2021	226.910	5,36	75,36	1,42	1
KOTA MINAHASA UTARA	2022	229.370	5,5	75,92	1,51	1
KOTA MINAHASA UTARA	2023	231.280	5,41	76,5	2,68	1
KABUPATEN KEPULAUAN SITARO	2021	72.140	4,43	68,05	1,88	1
KABUPATEN KEPULAUAN SITARO	2022	72.520	5,19	68,94	1,93	1
KABUPATEN KEPULAUAN SITARO	2023	73.400	5,25	69,57	2,15	1
KOTA MAKASSAR	2021	1.434.440	4,47	84	2,04	1
KOTA MAKASSAR	2022	1.448.880	5,4	84,45	2,45	1
KOTA MAKASSAR	2023	1.454.960	5,31	84,85	3,41	1
KABUPATEN TAKALAR	2021	304.170	5,05	70,25	1,88	1
KABUPATEN TAKALAR	2022	308.530	4,64	70,86	1,99	1
KABUPATEN TAKALAR	2023	312.810	3,86	71,46	2,27	1
KABUPATEN JENEPONTO	2021	405.240	5,4	64,56	1,84	0
KABUPATEN JENEPONTO	2022	409.890	3,81	65,13	2,16	0
KABUPATEN JENEPONTO	2023	414.480	1,9	65,9	3,09	0
KOTA KENDARI	2021	351.060	3,86	84,83	1,79	1

KOTA KENDARI	2022	357.650	4,94	85,19	2,04	1
KOTA KENDARI	2023	364.220	3,29	85,51	2,42	1
KABUPATEN KONAWE SELATAN	2021	312.920	4,76	68,88	2,52	0
KABUPATEN KONAWE SELATAN	2022	318.350	5,85	69,67	2,04	0
KABUPATEN KONAWE SELATAN	2023	323.790	5,19	70,64	2,67	1
KOTA BAUBAU	2021	161.280	4,15	77,75	1	1
KOTA BAUBAU	2022	163.720	5,28	78,15	1,38	1
KOTA BAUBAU	2023	166.150	3,38	79	1,95	1
KABUPATEN PULAU TALIABU	2021	58.744	12,74	62,75	1,23	0
KABUPATEN PULAU TALIABU	2022	59.601	3,45	63,65	1,58	0
KABUPATEN PULAU TALIABU	2023	63.897	2,6	64,31	1,73	0
KOTA TERNATE	2021	205.870	2,56	80,63	1,02	1
KOTA TERNATE	2022	206.745	5,31	81,28	1,06	1
KOTA TERNATE	2023	210.636	5	81,79	1,2	1
KABUPATEN HALMAHERA BARAT	2021	134.630	1,2	67,2	1,18	1
KABUPATEN HALMAHERA BARAT	2022	137.541	3,2	67,84	1,33	1
KABUPATEN HALMAHERA BARAT	2023	137.543	2,05	68,56	1,79	1
KABUPATEN MANOKWARI	2021	195.483	3,69	73,36	1,51	1
KABUPATEN MANOKWARI	2022	198.669	1,98	73,92	1,6	1
KABUPATEN MANOKWARI	2023	201.821	1,06	74,52	1,68	0
KABUPATEN TELUKBINTUNI	2021	88.105	-2,3	67,67	1,08	1
KABUPATEN TELUKBINTUNI	2022	89.105	2,06	68,29	1,26	1
KABUPATEN TELUKBINTUNI	2023	90.101	6,05	69,01	1,53	1
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	2021	38.964	4,55	56,13	1	1
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	2022	39.848	14,03	57,01	1,08	1
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	2023	40.685	10,12	57,82	1,17	1

KOTA SABANG	2021	41.674	2,67	77,29	1,53	1
KOTA SABANG	2022	42.289	2,57	78,03	1,59	1
KOTA SABANG	2023	42.888	2,96	78,7	2,44	1
KABUPATEN PIDIE	2021	438.976	2,63	71,99	1,98	1
KABUPATEN PIDIE	2022	443.555	3,98	72,49	2,05	1
KABUPATEN PIDIE	2023	448.085	3,95	72,95	2,04	1
KOTA BANDA ACEH	2021	255.495	5,5	87,36	2,62	1
KOTA BANDA ACEH	2022	258.786	5,23	87,92	3,15	1
KOTA BANDA ACEH	2023	261.969	5,06	88,32	3,54	1
KABUPATEN BEKASI	2021	3.148.740	3,62	74,45	1,58	1
KABUPATEN BEKASI	2022	3.193.840	5,3	75,22	1,74	0
KABUPATEN BEKASI	2023	3.237.420	5,32	75,76	3,28	1
KABUPATEN BOGOR	2021	5.484.150	3,55	70,6	2,72	0
KABUPATEN BOGOR	2022	5.556.838	5,25	71,2	3,33	0
KABUPATEN BOGOR	2023	5.627.021	5,19	71,78	3,71	0
KABUPATEN BANDUNG	2021	3.652.400	3,56	72,73	2,98	1
KABUPATEN BANDUNG	2022	3.687.250	5,35	73,16	2,84	1
KABUPATEN BANDUNG	2023	3.721.110	4,97	73,74	3,48	1
KOTA BENGKULU	2021	378.604	3,47	80,54	1,68	1
KOTA BENGKULU	2022	384.841	5,69	80,99	2,22	1
KOTA BENGKULU	2023	391.045	5,53	81,45	2,61	1
KABUPATEN SELUMA	2021	210.505	2,18	67,03	1,41	0
KABUPATEN SELUMA	2022	213.755	2,92	67,76	2,57	1
KABUPATEN SELUMA	2023	216.977	2,61	68,27	2,54	1
KABUPATEN KAUR	2021	127.953	3,08	67,17	1	1
KABUPATEN KAUR	2022	129.661	3,78	67,77	1,27	0
KABUPATEN KAUR	2023	131.345	3,4	68,38	2,24	0
KABUPATEN SUMBAWA	2021	515.211	1,87	68,01	2,11	1
KABUPATEN SUMBAWA	2022	522.357	3,21	68,89	2,26	0
KABUPATEN SUMBAWA	2023	529.487	3,61	69,87	2,75	0
KOTA BIMA	2021	156.838	2,08	76,11	2,02	1
KOTA BIMA	2022	159.107	2,7	77,84	1,91	1
KOTA BIMA	2023	161.362	5,16	77,36	1,88	1
KABUPATEN LOMBOK TIMUR	2021	1.344.733	3,12	66,66	1,88	1

KABUPATEN LOMBOK TIMUR	2022	1.366.136	3,18	66,66	1,94	1
KABUPATEN LOMBOK TIMUR	2023	391.382	4,31	68,41	2,46	1
KABUPATEN BADUNG	2021	549.000	-6,74	81,83	1,78	1
KABUPATEN BADUNG	2022	549.527	9,97	82,13	2,5	1
KABUPATEN BADUNG	2023	563.330	11,29	83,08	3,66	1
KABUPATEN GIANJAR	2021	520.000	-1,05	77,7	2,73	1
KABUPATEN GIANJAR	2022	523.972	4,04	78,39	2,73	1
KABUPATEN GIANJAR	2023	524.033	5,06	79,24	3,14	1
KOTA DENPASAR	2021	726.600	-0,92	84,03	3,19	1
KOTA DENPASAR	2022	726.804	5,02	84,37	3,68	1
KOTA DENPASAR	2023	748.400	5,69	84,73	3,8	1
KABUPATEN BUNGO	2021	367.200	4,99	70,15	1,46	1
KABUPATEN BUNGO	2022	373.300	4,73	70,55	1,52	1
KABUPATEN BUNGO	2023	376.400	4,66	71,06	1,95	1
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	2021	320.600	1,36	68,16	1,1	1
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	2022	324.500	2,56	68,79	1,65	1
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	2023	330.500	3,51	69,35	1,71	1
KOTA JAMBI	2021	612.200	4,13	79,12	1,69	1
KOTA JAMBI	2022	619.600	5,38	79,58	2,81	1
KOTA JAMBI	2023	627.800	6,61	80,15	4,27	1
KABUPATEN TABALONG	2021	256.903	3,27	72,6	2,48	1
KABUPATEN TABALONG	2022	261.400	5,29	73,13	2	1
KABUPATEN TABALONG	2023	263.400	4,9	73,85	3,21	1
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	2021	260.754	3,01	66,12	2,46	1
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	2022	263.100	3,92	69,7	2,69	1
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	2023	266.200	4,11	70,13	2,69	1
KOTA BANJARMASIN	2021	662.320	3,41	77,57	2,48	1
KOTA BANJARMASIN	2022	667.500	5,69	77,97	3,33	1
KOTA BANJARMASIN	2023	666.400	5,62	78,5	4	1
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	2021	214.733	3,4	65,83	1,6	0

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	2022	217.958	5,63	66,67	1,75	0
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	2023	222.449	4,67	67,56	1,86	0
KABUPATEN BURU SELATAN	2021	76.715	3,5	64,8	1	0
KABUPATEN BURU SELATAN	2022	78.515	5,53	65,37	1,17	0
KABUPATEN BURU SELATAN	2023	79.455	4,58	66,23	1,44	0
KOTA AMBON	2021	347.644	4,08	81,23	2,08	0
KOTA AMBON	2022	348.225	5,11	81,63	2,27	0
KOTA AMBON	2023	358.826	4,47	82,06	2,25	0
KABUPATEN BULUNGAN	2021	153.556	3,75	71,8	2,1	1
KABUPATEN BULUNGAN	2022	155.823	5,17	72,08	2,32	1
KABUPATEN BULUNGAN	2023	158.049	4,6	72,72	3,34	1
KABUPATEN NUNUKAN	2021	201.619	4,04	66,46	2,2	1
KABUPATEN NUNUKAN	2022	204.762	5,24	67,16	2,38	1
KABUPATEN NUNUKAN	2023	207.873	4,16	67,7	2,61	1
KABUPATEN MALINAU	2021	83.493	4,5	72,32	1,98	1
KABUPATEN MALINAU	2022	84.509	5,02	72,75	2,04	1
KABUPATEN MALINAU	2023	87.492	4,18	73,19	2,34	1
KABUPATEN DONGGALA	2021	302.965	4,64	65,72	1	0
KABUPATEN DONGGALA	2022	304.110	3,86	66,25	1,4	0
KABUPATEN DONGGALA	2023	308.300	4,68	66,95	1,64	0
KABUPATEN PARIGI MOUTONG	2021	443.170	4,67	65,82	1,5	1
KABUPATEN PARIGI MOUTONG	2022	444.513	3,71	66,26	1,54	1
KABUPATEN PARIGI MOUTONG	2023	457.031	3,5	67,11	2,68	0
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	2021	120.142	5,07	65,61	1,89	0

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	2022	127.834	4,94	66,08	2,04	0
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	2023	129.017	3,94	66,82	2,32	0
KABUPATEN GORONTALO	2021	395.635	2,43	67,34	1,31	1
KABUPATEN GORONTALO	2022	398.801	3,93	68,28	2,06	1
KABUPATEN GORONTALO	2023	405.322	4,51	69,09	2,68	1
KABUPATEN POHUWATO	2021	147.689	2,21	65,8	2,01	1
KABUPATEN POHUWATO	2022	149.297	3,08	66,53	2,08	1
KABUPATEN POHUWATO	2023	151.850	4,4	67,15	2,41	1
KABUPATEN BONE BOLANGO	2021	164.277	2,2	70,25	2,02	1
KABUPATEN BONE BOLANGO	2022	166.200	4,02	70,9	2,3	1
KABUPATEN BONE BOLANGO	2023	168.556	4,47	71,51	2,95	1
KABUPATEN MAMUJU	2021	281.854	2,35	68,32	1,52	1
KABUPATEN MAMUJU	2022	285.616	3,24	68,88	1,93	1
KABUPATEN MAMUJU	2023	286.699	4,37	69,61	2,15	1
KABUPATEN MAMASA	2021	164.802	2	66,63	1,02	0
KABUPATEN MAMASA	2022	166.471	1,79	67,21	1	0
KABUPATEN MAMASA	2023	167.070	2,72	67,83	1,23	0
KABUPATEN PASANGKAYU	2021	193.098	3,78	68,03	1	1
KABUPATEN PASANGKAYU	2022	198.608	-0,08	68,61	1,11	1
KABUPATEN PASANGKAYU	2023	206.600	6,78	69,11	1,75	1
KABUPATEN MAPPI	2021	109.579	1,95	58,7	1,53	0
KABUPATEN MAPPI	2022	111.141	5,1	59,61	1,62	0
KABUPATEN MAPPI	2023	112.070	2,71	60,57	1,73	0
KOTA JAYAPURA	2021	404.004	3,17	80,11	1,74	1
KOTA JAYAPURA	2022	410.852	3,87	80,61	1,88	1
KOTA JAYAPURA	2023	417.611	4,53	81,14	2,3	1
KABUPATEN MERAUKE	2021	231.696	1,47	70,49	1,05	1

KABUPATEN MERAUKE	2022	232.357	4,18	71,24	1,06	1
KABUPATEN MERAUKE	2023	240.609	4,2	72,19	1,66	1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	297	38964	5627021	621385.46	828384.508
x2	297	-6.74	29.85	4.3695	2.53264
x3	297	56.13	88.32	73.2864	6.35483
x4	297	1.00	4.49	2.2620	.72708
y	297	0	1	.79	.407
Valid N (listwise)	297				

Hasil Metode Analisis Regresi Logistik

a. Menguji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	305.728	1.165
	2	304.310	1.325
	3	304.307	1.332
	4	304.307	1.332

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 304.307
- c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Constant	Coefficients			
				x1	x2	x3	x4
Step 1	1	272.928	-4.728	.000	-.003	.072	.354
	2	262.335	-8.075	.000	.006	.117	.580
	3	261.620	-9.287	.000	.013	.132	.651
	4	261.614	-9.408	.000	.015	.134	.656
	5	261.614	-9.409	.000	.015	.134	.656
	6	261.614	-9.409	.000	.015	.134	.656

- a. Method: Enter
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 304.307
- d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

b. Menguji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test)

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	4.833	8	.775

c. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.331 ^a	.110	.096	.827

a. Predictors: (Constant), x4, x2, x1, x3

b. Dependent Variable: y

d. Analisis Regresi Logistik

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	x1	.000	.000	7.631	1	.006	1.000
	x2	.015	.071	.042	1	.838	1.015
	x3	.134	.032	17.353	1	.000	1.143
	x4	.656	.286	5.252	1	.022	1.928
	Constant	-9.409	2.156	19.049	1	.000	.000

a. Variable(s) entered on step 1: x1, x2, x3, x4.

Hasil Uji Hipotesis

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	x1	.000	.000	7.631	1	.006	1.000
	x2	.015	.071	.042	1	.838	1.015
	x3	.134	.032	17.353	1	.000	1.143
	x4	.656	.286	5.252	1	.022	1.928
	Constant	-9.409	2.156	19.049	1	.000	.000

a. Variable(s) entered on step 1: x1, x2, x3, x4.